

PENCEGAHAN PENULARAN VIRUS CORONA DI MASJID AGUNG BAITUL MUKMININ KABUPATEN JOMBANG

Dana Fauziah Muslimah, Ahmad Suyuthi

UIN Sunan Ampel Surabaya

danafauziahmuslimah@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to see how successful the implementation and the resulting impact on the Jombang Regency regent's regulations were in preventing the transmission of the corona virus which was located at the Baitul Mukminin Great Mosque of Jombang Regency. The method used is descriptive qualitative research method with the type of qualitative research-case study. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. This study uses the theory of implementation model by Edwards George III and impact thinking by Thomas R. Dyee. In this research produce. The findings of this study are: first, during the implementation of the health protocol, there was a change in behavior for both the takmir of the mosque and the congregation of the mosque. The difference is that at the beginning of the pandemic, they were very strict in implementing the protocol, but over time during the new normal, the level of awareness has decreased. This happened because the mosque was inconsistent in implementing protocol discipline and the congregations who were still there were negligent of the health protocol. In addition, the monitoring carried out by the government and the mosque was not optimal. Second, in every policy that is implemented, there will always be an influence or impact, both positive and negative impacts, including in the health protocol policy

Keywords: Prevention, Covid-19, Implementation, Impact, Regent's regulation, Mosque

Pendahuluan

Indonesia masuknya covid-19 yakni pada awal Maret 2020 yang merupakan awal ditemukannya kasus covid-19. Bermula dengan ditemukannya 2 yang terindikasi covid-19 namun dalam perkembangan penyebarannya hingga sampai saat ini terus meningkat yang per tanggal 10 juli 2021 kasus yang terkonfirmasi sudah mencapai 2.455.912 jiwa. Dengan akumulasi 367.733 kasus aktif dan data dengan jumlah 2.023.548 jiwa dinyatakan sembuh dan data kematian 64.631 jiwa.¹Indonesia juga merupakan negara di Asia Tenggara yang dalam angka kematian akibat penyebaran virus covid-19 dinilai

¹ Data sebaran virus covid-19 10 Juli 2021. <https://covid19.go.id/> yang diakses pada sabtu 10 Juli 2021 pukul 12.44 WIB

cukup tinggi. Hal tersebut terjadi karena kinerja pemerintah yang dinilai lamban dalam penanggulangan penyebaran saat terjadi awal ditemukan virus di Indonesia.

Jawa timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk ± 39 juta jiwa, melihat dari segi penyebaran virus covid-19 ini relatif tinggi dengan menyumbang jumlah kasus mencapai 189.707 jiwa per tanggal 9 juli 2021 dengan data kumulatif kasus aktif 13.663 jiwa dan data 162.209 jiwa sudah dalam keadaan sembuh dan sebanyak 14.013 adalah data jumlah kematian di Jawa Timur². Dengan melihat tingginya angka penyebaran virus covid-19 maka hal tersebut mengakibatkan beberapa wilayah di Jawa timur dalam kondisi beresiko tinggi penyebaran virus covid-19.

Kabupaten Jombang sebagian wilayahnya sudah masuk dalam zona merah yang mana sudah dalam status darurat covid-19 sehingga sampai saat ini penyebaran virus covid-19 di Jombang mencapai 5.809 orang terinfeksi virus covid-19 dengan akumulasi data penyembuhan sebanyak 4.695 jiwa dan kasus aktif 479 jiwa dan data kematian 635 jiwa yang dilihat pada per tanggal 10 Juli 2021.³ Kebanyakan penularan terjadi karena memang banyak dari warga Jombang yang bekerja di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta dan kota lainnya selain itu juga masih kurang atas kesadaran dari masyarakat Jombang yang mematuhi protokol kesehatan seperti tidak memakai masker saat bepergian keluar rumah dan masih sering terjadi kerumunan orang-orang. Pemerintah Kabupaten Jombang juga telah membuat kebijakan publik yang berupa peraturan bupati No 57 tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian virus covid-19.

Masjid dalam hal ini merupakan sarana ibadah untuk umat muslim yang juga berpotensi untuk menyumbang penularan virus covid-19. Masjid Agung Baitul Mukminin merupakan masjid yang tertua dan terbesar di Kabupaten Jombang. Melihat peningkatan yang signifikan dan masif di Kabupaten Jombang dalam hal ini peneliti tertarik untuk melihat dan menilai lebih dalam terkait upaya oleh pihak masjid dalam mengelola kegiatan keagamaan di masjid selama pandemi ini.

² Data sebaran viru covid-19 pada 9 Juli 2021 <http://infocovid19.jatimprov.go.id/> yang diakses pada 10 Juli 2021

³ Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang per tanggal 10 Juli 2021

Agar lebih spesifik terkait penelitian ini, maka rumusan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana pencegahan penularan virus corona di masjid Agung Baitul Mukinin Kabupaten Jombang dalam implementasi peraturan bupati Kabupaten Jombang nomor 57 tahun 2020 dan bagaimana dampak peraturan Bupati nomor 57 tahun 2020 tentang pencegahan penularan virus corona. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan bupati no 57 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan virus corona pada kegiatan keagamaan di Masjid Baitul Mukminin serta mengetahui dampak atau pengaruh dari masyarakat terhadap adanya implementasi peraturan bupati no 57 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan virus corona.

Definisi Konseptual

1. Kebijakan Publik

Menurut James Anderson “kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi”⁴ Anderson menganggap bahwa lebih mempersoalkan mengenai tentang perilaku atau langkah yang tepat untuk menghadapi suatu permasalahan yang dihadapi.

Kebijakan dibuat dari berbagai tahap yakni *pertama* Penyusunan agenda. Dalam tahap ini pemerintah menempatkan masalah pada agenda publik. Kemudian ada beberapa persoalan yang harus untuk diteruskan atau dihentikan. Pada tahap *kedua* Formulasi kebijakan pemerintah memberikan penyusunan untuk mencari alternatif jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi. Dalam hal ini tindakan legislatif, perintah eksekutif sangat diperlukan untuk menyempurnakan hasil. Pada tahap *ketiga* merupakan Adopsi Kebijakan yakni alternatif kebijakan yang diadopsi untuk mendapatkan dukungan terbanyak oleh pihak legislatif terhadap kebijakan tersebut. Tahap *keempat* yakni Implementasi Kebijakan, implementasi merupakan hal yang genting dilakukan dalam tahap perumusan kebijakan karena dalam tahap ini dapat dilihat berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Dalam hal ini dilakukan oleh para implementor. Terakhir tahap *kelima* adalah penilaian kebijakan dalam hal ini adalah untuk mengevaluasi dari telah

⁴ Suharno, Dasar-dasar kebijakan publik : Kajian proses dan analisis kebijakan, cet 1, (Yogyakarta : Penerbit Ombak 2016) hlm 4

dilakukannya implementasi kebijakan. Menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut.⁵

2. Implementasi

Pemahaman mengenai implementasi dapat dimulai dari makna implementasi tersebut. Implementasi hadir setelah aktor politik merumuskan adanya kebijakan, bisa dari pemerintah tingkat senter hingga tingkat setiap daerah. Implementasi merupakan kegiatan penerapan dari kebijakan tersebut. Kebijakan hadir tentu memiliki arah yakni dengan adanya tujuan-tujuan dan program tertentu, maka dengan melihat bagaimana implementasi dilakukan maka dapat untuk melihat dampak dari adanya kebijakan tersebut sehingga akhirnya pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan tersebut guna menyempurnakan kekurangan atau kendala yang dihadapi.⁶

Dalam mempengaruhi suatu keberhasilan maupun ketidakberhasilan pada kebijakan ditemukan terdapat faktor-faktor yang dapat dipetakan setelah dilakukannya serangkaian penelitian oleh peneliti . Melihat dalam sebuah realita yang ada maka kumpulan dari faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut yang akhirnya disebut sebagai adanya gaya dalam studi implementasi itu sendiri. Upaya-upaya yang dilakukan dengan tujuan agar menyederhanakan realitas sebuah implementasi kebijakan yang kalut menjadi lebih sederhana dan mudah.⁷

3. Definisi Dampak

Bila membahas tentang dampak tentu dalam hal ini merupakan suatu pengaruh yang mendatangkan akibat baik maupun akibat buruk. Pengaruh merupakan suatu hubungan timbal balik yang mana dapat apa mempengaruhi dan dipengaruhi yang merelavikannnya dengan sebab akibat.⁸

4. Implementasi Kebijakan

⁵ William N. Dunn, Pengantar analisis kebijakan publik (Yogyakarta : Gajah mada University press 2003) hlm 24-25

⁶ Inu Kencana Syafie. Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi), (Bandung : Refika Aditama 2008) hal 56

⁷ Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyawati, Implementasi kebijakan publik : Konsep dan aplikasinya di Indonesia, cet 2, (Yogyakarta : Gava media 2015) hlm 16

⁸ Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang :Widya Karya hlm 243

Setiap kebijakan pemerintah yang telah disahkan maka sudah tentu harus diimplementasikan kepada masyarakat, karena dalam implementasi kebijakan itu merelasikan arah kebijakan dengan realisasinya dengan hasil yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dilaksanakannya implemetasi kebijakan dapat melihat tingkah laku kelompok sasaran kebijakan dilihat dari sudut pandang perilaku. Karena kepatuhan dari kelompok sasaran kebijakan tersebut sangat memiliki peran penting dalam keberhasilan adanya kebijakan itu sendiri.⁹ Menurut Gridle dalam Subarsono “ *establish a link that allows goals of public policies to be realized as utcome of governmental activity*”¹⁰ memberi penjelasan bahwa dalam tahap ini implementasi kebijakan menjadi sebuah penghubung antara dunia konsep dengan dunia realita. Kita pahami bahwa menyatukan apa yang telah tersusun dengan sebaik mungkin dengan yang sebenarnya terjadi memang tidak mudah perlu adanya kompleksitas implementasi yang dilakukan.

5. Pengertian Kepala Daerah

Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki kepala daerah yang mana dalam hal ini kepala daerah baik provinisi, kabupaten atau kota hingga tingkat desa. Kepala daerah merupakan pimpina eksekutif dala ruang ingup pemerintah daerah. Setiap kepala daerah dari Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga desa memiliki kewenangan dalam membentuk kebijakan publik yang berdasar. Sebagaimana yang tertera dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaga Daerah dalam pasal 1.¹¹ Kedudukan dalam peraturan kepala daerah (Perkada) ini juga tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang tahun 2011. Walaupun secara hierarki tidak disebutkan secara khusus mengenai kedudukan dari peraturan kepala daerah (Perkada) itu sendiri. Namun bukan berarti bahwa peraturan kepala daerah tidak memiliki dasar hukum. Pada pasal 8 ayat 2 Undang-undang no 12 Tahun 2011¹²

Teori Implementasi Kebijakan Publik George C. Edwards Iii (1980)

Penggunaan teori pertama adalah oleh pemikiran tokoh politik yakni George C. Edwards III (1980). George C. Edwards merupakan profesor yang terkemuka dalam

⁹ HAEDAR AKIB, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010

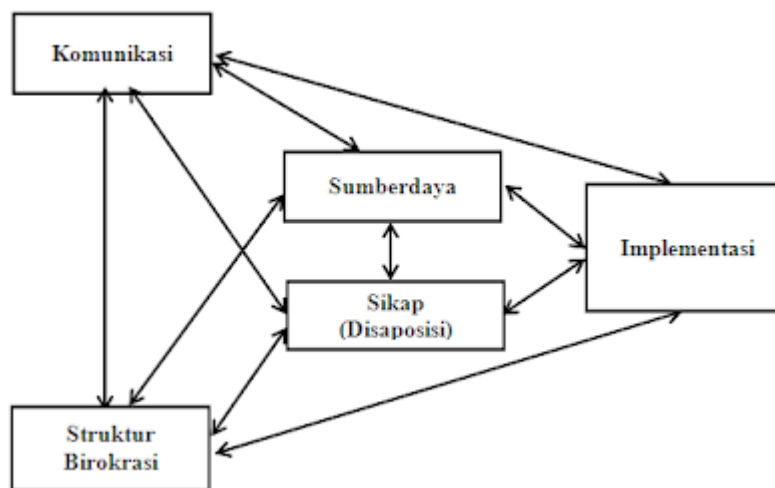
¹⁰ Subarsono, Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi , Cet X (Yogyakarta : Pustaka pelajar 2021) hlm 66

¹¹ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006

¹² Undang-undang no 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan perundang-undangan

bidang politik. Pemikirannya mengenai sumbangsih dunia perpolitikan ini cukup dikenal dalam dunia akademisi, seperti pemikirannya mengenai tentang implementasi kebijakan. George C. Edwards dalam pandangannya bahwa model implementasi kebijakan ini memiliki empat variabel yang mendukung, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.¹³

Gambar
Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edwards III



(Sumber: Implementasi Kebijakan Publik dalam Analisis Subarsono)

1. Komunikasi

Perlunya dilakukan komunikasi guna untuk mendukung implementasi memahami maksud dari tujuan suatu kebijakan itu hadir karena hal tersebut mendorong keberhasilan implementasi kebijakan.¹⁴ Komunikasi sangat penting karena dalam menyampaikan informasi juga harus tepat dan sesuai dan agar tidak adanya kesalahpahaman atau *miss communication* antara pembuat kebijakan dengan kelompok sasaran, penyampaian kebijakan juga harus konsisten dan komitmen artinya tidak berganti-ganti kebijakan yang dilakukan pada pemerintah agar selaku implementor dan kelompok sasaran tidak bingung dalam menerapkan kebijakan. Kejelasan komunikasi ini dalam suatu implementasi ini dinilai penting memahami apa yang seharusnya boleh untuk dilakukan dan mana yang seharusnya tidak boleh untuk

¹³ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*, Cet X (Yogyakarta : Pustaka pelajar 2021) hlm 90

¹⁴ Ibid

dilakukan agar terciptanya implementasi kebijakan yang diinginkan pada tujuan awal.¹⁵

2. Sumber daya

Faktor yang penting lainnya yakni sumber daya, baik berupa manusia, maupun finansial yang mencukupi dalam menjalankan kebijakan itu sendiri.¹⁶ Logika perlu adanya sumber daya karena jika komunikasi sudah dilakukan dengan sebaik mungkin tetapi bila sumber daya tidak memadai kebijakan yang dihasilkan tidak berjalan dengan baik. Agar kebijakan dapat berjalan efektif sumber daya pada implementasi kebijakan sangat diperlukan.¹⁷

3. Disposisi

Disposisi juga dapat diartikan sebagai sikap pelaksana¹⁸ atau juga menjadi ciri khas dari yang implementor itu sendiri. seperti sikap yang jujur dan komitmen akan perilaku dan penyampaian kepada kelompok sasaran. Disposisi ini juga menjadi faktor yang penting dalam menunjang keberhasilan implementasi. Jika selaku pelaksana dapat bersikap dengan baik yang artinya mendukung dengan adanya kebijakan tersebut maka implementasi berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan, tetapi sebaliknya bila pelaksana tidak berperilaku baik artinya menolak kebijakan tersebut maka tidak akan pernah kebijakan itu dikatakan berhasil.¹⁹

4. Struktur birokrasi

Faktor struktur birokrasi menurut George C. Edwards III juga sangat penting karena menganggap bahwa dalam melakukan pengaplikasian suatu kebijakan perlu adanya birokrasi yang mana ada dua hal penting yang harus diperhatikan yaitu mekanisme dan struktur organisasi dari pelaksana tersebut.²⁰ Pada implementor yang bertindak perlu adanya prosedur operasi yang standart (*Standart operating procedures*

¹⁵ Nurtje Iriani Djoys Guyen, Skripsi, *Implementasi kebijakan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) Dinas pendidikan dan pemuda olahraga Kabupaten Kepulauan Aru*, Jakarta : 2014

¹⁶ Awan Y. Abdoellah, Yudi Rustiana, *Kebijakan Publik : Teori dan analisis kebijakan publik*, (Bandung : Alfabeta 2012) hlm 69

¹⁷ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*, Cet X (Yogyakarta : Pustaka pelajar 2021) hlm 92

¹⁸ Op.cit.,

¹⁹ Andrianto, *Implementasi kebijakan program kartu tangerang pintar pada jenjang pendidikan SMAN, SMK dan MAN di Kabupaten Tangerang*, Skripsi, Banten : 2017

²⁰ Akhmad Rafi'i, dkk, Implementasi undang-undang republik Indonesia no 6 tahun 2014 tentang desa : studi pada fungsi badan permusyawaratan desa di desa Bintang Ninggi II Kecamatan Taweh Selatan Kabupaten Barito Utara, *Jurnal Administrasi Publik* Volume 6 No 1 tahun 2020

atau SOP) dalam suatu struktur organisasi agar menjadi pedoman saat melakukan kegiatan.²¹

Teori Dampak Kebijakan Publik Thomas R. Dyee

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahap untuk mengetahui tentang dampak dari adanya kebijakan yang telah diterapkan pada masyarakat. Menurut Subarsono “*“impact”* adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang telah diimplementasikan”²² perlu dipahami bahwa sering terjadinya program pemerintah yang masih membingungkan atau terjadi tumpang tindih, maka hadirnya suatu program kebijakan yang telah dilakukan akan berakibat berupa wujud dampak, jadi tidak ada keikutsertaan oleh aturan atau program kebijakan yang lainnya.

Pada evaluasi dampak ini berfokus pada *output* (keluaran dari kebijakan) dan dampak yang terjadi setelah kebijakan itu diimplementasikan. Dapat dipahami bahwa ada perbedaan antara *policy impact* dengan *policy output* bahwa kegiatan yang berakibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya kegiatan *output* yang telah dilakukan dan dihasilkan dari adanya suatu kebijakan pemerintah.²³ Menurut Thomas R. Dyee mengemukakan bahwa ada lima kumpulan faktor yang termasuk dampak pada implementasi kebijakan yang melihat pada kondisi realitanya bahwa sebagai berikut ²⁴ :

- a. Dampak kebijakan pada konflik publik dan pengaruh kebijakan pada orang-orang yang terlibat, dengan begitu bahwa pada pembuatan awal kebijakan harus menentukan sasaran dan dampak dari kebijakan publik yang akan dibuat.
- b. Kebijakan publik telah diperkirakan oleh aktor perumusan kebijakan publik bahwa mungkin akan bisa berpengaruh terhadap atau kelompok di luar sasaran atau tujuan dari adanya kebijakan publik tersebut.
- c. Kebijakan yang telah dibuat oleh perumus kebijakan tidak lepas kemungkinan akan berdampak pada masa saat ini atau diimplementasikan kebijakan publik tersebut dan pada masa yang akan mendatang.

²¹ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*, Cet X (Yogyakarta : Pustaka pelajar 2021) hlm 92

²² Ibid., hlm 122

²³ Rini Sulistiyani, *Dampak kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat usaha garam rakyat (PNPM PUGAR) terhadap petani garam desa Kedungmuti kecamatan Wedung kabupaten Demak*, Skripsi, 2015

²⁴ Ibid.,

- d. Menyangkut unsur lain dalam pembahasan evaluasi, yakni bisa langsung pada pembiayaan kebijakan yang dilimpahkan untuk kebutuhan finansial dalam kebijakan public.

Masyarakat juga menanggung tanggungan biaya yang secara tidak langsung ataupun pada sekelompok anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini menilai keberhasilan implementasi kebijakan tersebut terhadap masyarakat yang mana disajikan dan dianalisis dalam bentuk narasi yang didalamnya berisikan beberapa kutipan-kutipan penting untuk mendukung dan menyempurnakan terhadap isi pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini.²⁵ Penelitian ini dilakukan di Masjid Baitul Mukmin yang beralamatkan di Jalan KH. A. Dahlan No 28, Jombatan Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Jawa Timur sesuai dengan judul.

Informan merupakan unsur penting dalam melakukan penelitian kualitatif, karena melalui informan peneliti mampu untuk mengumpulkan sumber data dan gambaran terkait dengan tema topik permasalahan. Teknik purposive adalah yang digunakan di peneliti ini dalam menentukan informan, karena pada teknik purposive ini peneliti dapat menentukan informan yang mengetahui dan memahami maksud peneliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan data.²⁶ Adapun informan yang diambil dalam penelitian meliputi kepala sekretariat takmir masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang, Jamaah masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang, dinas kesehatan Kabupaten Jombang serta pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan observasi dengan alat bantu selama melakukan observasi adalah kamera dan catatan lapangan. Sedangkan kegiatan wawancara dilakukan secara mendalam, adapun alat bantu dalam melakukan wawancara ini adalah dengan menggunakan panduan wawancara atau instrumen wawancara baik depan bertemu langsung dan dengan melalui telepon seluler dan aplikasi *whatsapp* seperti recorder wawancara dan kamera. Teknik keabsahan data juga diperhatikan bahwa dalam

²⁵ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak 2018) hlm 11

²⁶ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung : Penerbit Alfabeta 2013) hlm 53

penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi metode, sumber dan teori.

1. Pencegahan Penularan Virus Corona di Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang Dalam Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 57 Tahun 2020

Pada pembahasan ini terfokus pada tingkat keberhasilan menerapkan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pihak implementor kepada kelompok sasaran di tempat ibadah yakni masjid. Untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut perlu adanya kajian mendalam tentang implementasi kebijakan maka dalam penelitian ini menggunakan teori yang relevan yakni pada pemikiran George C. Edwards III yang mana bahwa dalam melihat tingkat keberhasilan suatu kebijakan itu terdapat empat faktor yakni meliputi:

a. Komunikasi

Penting untuk melakukan kegiatan komunikasi dari pihak perumus kebijakan dengan pihak pelaksana karena juga dapat menunjang keberhasilan dalam kebijakan. Dalam penerapannya bahwa sudah ada hubungan komunikasi dari pihak dinas kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas daerah setempat kepada takmir masjid tentang sosialisasi yang dilakukan dan juga monitoring atau pemantauan secara berkala kepada pihak takmir pada pelaksanaan kegiatan ibadah di masjid.²⁷ Dalam proses monitoring berlangsung pihak dari pemerintah daerah terkait seperti dinas kesehatan maupun satuan pamong praja juga sudah beberapa kali melakukan pengawasan di Masjid Agung Baitul Mukminin²⁸

Dalam penyampaian komunikasi kepada masyarakat dinas kesehatan juga melakukan beberapa cara seperti melakukan siaran radio setiap hari Rabu, kemudian memanfaatkan platform seperti instagram, facebook maupun website yang mana dilakukan untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya menjaga protokol kesehatan seperti mengupdate data penyebaran virus di Kabupaten Jombang sehingga meminimalisir adanya berita bohong.²⁹

²⁷ Wawancara dengan pak Lukman Hakim Kepala Sekretariat Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang, Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB

²⁸ Ibid.,

²⁹ Wawancara dengan Pak Pugu Kabag SE Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2021 Pukul 13.00 WIB

b. Sumber daya

Dalam pemenuhan kebutuhan pelaksanaan protokol kesehatan masih dilakukan secara mandiri oleh pihak takmir masjid. Meskipun demikian memang pada awal-awal penerapan protokol kesehatan dari pihak implementor cukup mengeluhkan pengeluaran yang begitu besar untuk memenuhi aturan tentang perbup ini. Mengenai hal ini dapat dipahami bahwa sumber daya finansial dalam pelaksanaan implementasi protokol kesehatan di masjid sudah mencukupi meskipun tidak adanya anggaran yang diberikan oleh dari pihak pemerintah.³⁰ Hal tersebut terjadi dikarenakan bahwa aturan untuk mendapatkan dana hibah untuk masjid saat ini di Kabupaten Jombang masih terbilang sulit karena yang diatur oleh pemerintah yang mendapatkan dana hibah hanya badan hukum dan yayasan saja.³¹

Dalam mencukupi pembiayaan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan masa pandemi ini, pihak Masjid merasa cukup dan tidak kekurangan untuk melaksanakan kegiatan ibadah selama pandemi. Selain itu juga ada beberapa kendala dalam sumber daya manusia yang mana pihak implementor kekurangan petugas atau tidak seimbang yang berakibat protokol kesehatan tidak bisa terpantau dengan ketat tetapi hal tersebut terjadi ketika adanya ketidak dugaannya lonjakan jamaah pada saat adanya hari besar. Seperti pada saat pelaksanaan shalat hari raya besar idul fitri, terjadi lonjakan jamaah yang tidak terduga sehingga membuat petugas menjadi kewalahan karena tidak dapat menjangkau yang berada di luar masjid.³²

c. Disposisi

Sikap pelaksana ini ditunjukkan oleh pihak takmir dengan adanya dukungan untuk melengkapi persyaratan atau pemenuhan kelengkapan fasilitas yang ada dalam kebijakan pada masa pandemi ini. Seperti menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer di pintu masuk masjid, dan arahan untuk melakukan cuci tangan yang baik dan benar menjaga jarak saat sholat. Seperti adanya tempat cuci tangan, hand saitaizer serta poster edukasi tentang protokol kesehatan. Dan sikap perilaku

³⁰ Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim Kepala Kesekretariat Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang, Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB

³¹ Wawancara dengan ibu Mita Aria Kabag Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Jombang, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Juni 2021 10.00 WIB

³² Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim Kepala Kesekretariat Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang, Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB

lainnya adalah seperti dilakukannya shalat berjarak, diwajibkan memakai masker dan pengecekan suhu tubuh.³³

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pengurus takmir masjid ini menerapkan sistem hierarki yang mana bahwa pengurus takmir membuat tim pelaksana harian agar lebih mudah untuk mengatur dan mengelola masjid karena memang anggota pengurus takmir memiliki berbagai kesibukan sehingga tidak dapat sepenuhnya mengawasi dan memantau kegiatan di masjid. Dalam tim pelaksana harian ini juga bertanggung jawab penuh kepada pengurus takmir masjid, jadi untuk menerapkan protokol kesehatan di masjid adalah tim pelaksana harian di masjid. Hal tersebut juga dapat mempermudah pengawasan dan tertata secara sistematis.³⁴

2. Pencegahan Penularan Virus Corona di Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang

Dalam melakukan pencegahan penularan virus covid-19 untuk menerapkan protokol kesehatan di masjid mencakup beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut:

a. Aspek Pedoman Penyelenggaraan Ibadah

Dalam peraturan Bupati tertera bahwa setiap tempat ibadah harus memiliki surat keterangan rumah ibadah aman dan bebas covid-19 yang memiliki daya tampung jamaah besar dan mayoritas jamaahnya adalah berasal dari kawasan lingkungan nya hal itu diwajibkan. Pengurus takmir juga diharuskan untuk mengajukan surat permohonan keterangan aman covid-19 untuk masjid yang sesuai dengan tingkatan daerahnya. Pada penelitian lebih lanjut bahwasanya ditemukan oleh peneliti bahwa pihak dari masjid ini belum memiliki surat keterangan aman covid-19. Hal tersebut semestinya tidak boleh terjadi, mengingat bahwa dalam pedoman protokol kesehatan di peraturan Bupati pihak penyelenggara kegiatan ibadah harus memenuhi persyaratan administratif. Surat keterangan lingkungan bebas covid-19 ini bertujuan untuk meyakinkan jamaah bahwa tempat yang digunakan ibadah sudah aman dan bebas covid-19.³⁵

³³ Ibid.,

³⁴ Ibid.,

³⁵ Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim Kepala Kesekretariat Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang, Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB

Pihak pemerintah atau aktor perumus kebijakan tidak optimal dalam memberlakukan kebijakan, karena pihak pemerintah tidak memantau kegiatan ibadah dengan rutin, hanya dilakukan ketika ada kegiatan sholat yang mendatangkan jamaah banyak saja seperti sholat gerhana, sholat hari raya dan shalat jumat dan juga memperbolehkan pihak masjid melakukan kegiatan ibadah walaupun secara administratif masih belum lengkap.

b. Aspek Kewajiban Pengurus Masjid

Setiap pihak penyelenggara tempat ibadah memiliki tanggung jawab atas seluruh kegiatan ibadah seperti yang tertera dalam lampiran pedoman peraturan Bupati. Sebenarnya pihak petugas takmir masjid telah melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan regulasinya seperti adanya penyemprotan berkala pada setiap kegiatan, pembatasan jarak sholat melakukan pengaturan jumlah jamaah dan juga telah memisah antara jamaah pendatang dengan jamaah yang berada dalam lingkungan daerah masjid. Seperti dengan adanya perlakuan khusus yang dilakukan oleh pihak takmir kepada masyarakat pendatang atau yang tidak biasa sholat di masjid adalah dengan sistem buka tutup pintu dalam masjid.

Jamaah yang pendatang diarahkan untuk sholat di serambi-serambi masjid bukan di dalam masjid karena pintu masjid akan dibuka hanya ketika sholat lima waktu dan akan ditutup setelah sholat selesai tetapi pagar masjid tetap terbuka untuk umum.³⁶ Selain itu juga untuk jamaah yang datang di masjid mengalami perbedaan sebelum pandemi dan setelah pandemi ini, karena memang dalam aturan peraturan Bupati Kabupaten Jombang ini untuk mengatur jumlah jamaah dan membatasi jumlah pintu di masjid guna untuk memudahkan pemantauan dan pembatasan jamaah yang melakukan ibadah di masjid. Bahwa dengan tidak menggunakan lantai dua bangunan masjid dan memfokuskan pada pintu gerbang utama masjid untuk keluar akses jalan.³⁷

Tetapi ditemukan bahwa adanya perubahan perilaku yang membuat petugas tidak lagi konsisten, seperti pada waktu awal pandemi penerapan protokol sangat ketat dalam melakukan protokol kesehatan di masjid akan tetapi seiring berjalannya waktu pada masa new normal saat ini petugas takmir tidak lagi konsisten dalam

³⁶ Ibid.,

³⁷ Ibid.,

memberlakukan protokol kesehatan. Bahwa saat sholat lima waktu ini tidak dilakukan cek suhu tubuh dan juga menyediakan untuk alat sholat bagi perempuan oleh pihak masjid.³⁸

Pihak masjid telah menyediakan alat sholat bagi perempuan karena mendapatkan keluhan dari jamaah wanita yang membutuhkan alat sholat. Memang sejatinya hal tersebut tidak diperkenankan meskipun mejamin kebersihan terjaga dengan mengganti alat sholat setiap hari, mengingat bahwa tidak setiap waktu petugas mengecek suhu jamaah yang datang untuk sholat di masjid sehingga tinjauan kesehatan setiap individu tidak dapat dipantau. Hal ini juga beresiko untuk terjadi penularan virus covid-19.³⁹

c. Aspek Kewajiban Masyarakat

Masyarakat merupakan sasaran dari adanya peraturan Bupati ini, yang mana tentu pihak masyarakat tidak lepas dari kewajiban untuk menerapkan protokol kesehatan. Dalam melakukan kegiatan ibadah saat ini dengan pada saat awal pandemi tahun lalu juga mengalami perubahan yakni adanya perilaku yang tidak konsisten. Masyarakat kebanyakan sudah tahu akan aturan saat melakukan kegiatan diluar rumah seperti mematuhi aturan 5M (mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi kerumunan dan menjauhi mobilitas).

Tetapi menilai pada realita yang terjadi bahwa masyarakat saat masa new normal saat ini menjadi lalai akan protokol kesehatan seperti pada saat masuk masjid memang memakai masker dan mencuci tangan dan setelah melaksanakan ibadah masker dilepas. Hal tersebut terjadi karena adanya pola hidup yang cenderung monoton dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat.⁴⁰

3. Dampak Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penularan Virus Corona

Sejatinya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki dampak atau pengaruh yang terjadi setelah peraturan itu diterapkan. Maka perumus kebijakan semestinya sudah memikirkan hal yang akan terjadi setelah kebijakan diterapkan

³⁸ Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim Kepala Kesekretariat Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang, Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ Wawancara dengan mbak Ima Jamaah Masjid Agung Baitul Mukminin, Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021 Pukul 12.00 WIB

kepada masyarakat. Masyarakat diharapkan komprehensif dalam menyingkapi peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam membahas terkait dampak, bahwa peneliti melakukan penilaian atau kajian analisis terhadap adanya dampak implementasi dari kebijakan peraturan Bupati tentang protokol kesehatan bahwa ada beberapa faktor melihat tentang kondisi dalam realitanya antara lain adalah:

- a. Dampak yang ada sesuai yang diharapkan atau yang tidak diharapkan yang terjadi pada masyarakatnya atau pada permasalahan.

Dampak sesuai yang diharapkan bahwa dalam peraturan Bupati tentang protokol kesehatan adalah menurunnya tingkat penyebaran virus covid-19 di Kabupaten Jombang, mengingat bahwa Jombang dilihat dalam pemantauan angka penyebaran masih relatif tinggi karena hampir semua daerah di Jombang telah memasuki zona merah yang artinya sudah dalam status darurat. Dampak tidak diharapkan adalah bahwa masyarakat sudah mulai merasakan kejenuhan, yang mana pada perilaku hidup masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan mengubah perilaku individu sehingga akan berdampak pada kepatuhan masyarakat.⁴¹

- b. Kebijakan publik mungkin akan berpengaruh pada diluar kelompok sasaran

Regulasi pemerintah daerah Kabupaten Jombang terkait protokol kesehatan sejatinya sudah cukup jelas bila dilihat dari segi normatifnya, akan tetapi secara teknis belum terlalu terperinci terkait pedoman yang dilampirkan, diketahui bahwa hanya ada pedoman protokol kesehatan di dalam pondok pesantren dan tempat ibadah yang terlampir memang bahwa hal yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk memprioritaskan yang lebih rentan resiko penularan virus. Sehingga hal tersebut lebih rentan terjadinya ketidakjelasan terhadap aturan yang mana akan menimbulkan kelompok sasaran lain lain rentan akan terjadi tumpang tindih kebijakan.

- c. Dampak kebijakan akan berpengaruh pada kondisi saat ini atau pada waktu yang akan datang

Dampak kebijakan yang akan berpengaruh pada kondisi mendatang atau kondisi terkini adalah adanya perubahan perilaku hidup disiplin, melihat bahwa dengan

⁴¹ Wawancara dengan Pak Pugu Kabag SE Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juni 2021 Pukul 13.00 WIB

adanya kebijakan tentang protokol kesehatan dapat mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih disiplin dalam berperilaku karena adanya regulasi tentang pedoman menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat dalam hal ini juga mengalami dampak karena merupakan kelompok sasaran yang dituju, bahwa tujuan dari adanya kebijakan adalah seberapa jauh *outcome* yang dihasilkan dari adanya *output* itu sendiri. Peraturan Bupati ini adalah regulasi secara terperinci dan jelas untuk melakukan pencegahan dan pengendalian virus covid-19 yang mana ditemukan adanya perubahan pola perilaku yang terjadi.⁴²

d. Dampak pada pembiayaan secara langsung

Membahas terkait pembiayaan finansial kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam implementasinya teru sudah diatur dalam setiap regulasi yang terkait, seperti di dalam peraturan Bupati bahwa pembiayaan keseluruhan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Meskipun ada beberapa jangkauan yang tidak mendapatkan pembiayaan secara langsung oleh pemerintah karena minim nya regulasi ketentuan yang tersedia.

e. Dampak kebijakan terhadap pembiayaan tidak langsung

Bahwa dalam hal ini pembiayaan tidak langsung adalah pembiayaan yang dibebankan kepada masyarakat, sebagaimana yang dialami oleh masyarakat yang mana harus memenuhi kebutuhan protokol kesehatan seperti membeli masker dan hand sanitizer. Selain itu pembiayaan terjadi untuk memenuhi kebutuhan konektifitas jaringan seperti membeli kuota internet yang cukup mahal. Pembiayaan yang dibebankan oleh masyarakat dinilai cukup memberatkan masyarakat karena kebutuhan finansial juga menjadi bertambah, hal tersebut jarang dipikirkan atau dibahas oleh pihak pemerintah.⁴³

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil dari penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implelementasi peraturan Bupati Kabupaten Jombang nomor 57 tahun 2020 sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi masih belum optimal baik dari pemerintah maupun dengan petugas masjid. Hal tersebut dibuktikan bahwa masih adanya

⁴² Wawancara dengan pak Agung imam sholat Masjid Agung Baitul Mukminin, Wawancara via whatsapp dilakukan pada tanggal 11 Juni 2021 Pukul 16.00 WIB

⁴³ Wawancara dengan pak Amir imam sholat masjid Agung Baitul Mukminin, Wawancara via telepon dilakukan pada tanggal 11 Juni 2021 Pukul 18.00 WIB

kelonggaran pemantauan protokol kesehatan di masjid selama melakukan kegiatan keagamaan dan juga pihak pemerintah juga tidak konsisten dalam artian bahwa masjid Agung Baitul Mukminin masih belum punya surat keterangan aman covid-19 tetapi diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan ibadah yang mendatangkan jumlah jamaah yang cukup besar dari berbagai wilayah di Kabupaten Jombang dan lambannya dalam pembuatan surat keterangan aman covid-19 untuk pihak masjid.

Dengan uraian dampak yang telah disampaikan mana peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya dampak positif dan dampak negatif yang terjadi dalam melakukan pencegahan penularan virus corona ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Dampak positif dari peraturan Bupati No 57 tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Penyebaran virus covid-19 menjadi lebih rendah
- b. Merubah perilaku masyarakat, dimana bahwa ditemukan bahwa merubah pola perilaku masyarakat yang awalnya tidak memperdulikan kebersihan menjadi lebih tertata
- c. Masyarakat mengikuti era digitalisasi, yang mana banyak lapisan masyarakat yang awalnya tidak tahu tentang kemajuan teknologi menjadi paham dan mengerti

Dampak negatif dari peraturan Bupati No 57 tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Pencemaran lingkungan karena adanya limbah sampah yang diakibatkan sampah masker sekali pakai atau masker bedah karena bahannya sulit untuk diuraikan sehingga menjadi persoalan.
- b. Keterbatasan sosial, dengan tidak diperbolehkannya melakukan kontak secara fisik menjadikan adanya batasan sosial didalam masyarakat.
- c. Kebutuhan finansial bertambah
- d. Penurunan Jamaah di Masjid Agung Baitul Mukminin karena adanya pandemi virus covid-19.

Penyebaran virus covid-19 berpotensi tinggi karena masih kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan

Daftar Pustaka

Abdoellah.Awan Y.Yudi Rustiana, *Kebijakan Publik : Teori dan analisis kebijakan public*. 2012. Bandung : Alfabeta

Akhmad Rafi'i, dkk, Implementasi undang-undang republik Indonesia no 6 tahun 2014 tentang desa : studi pada fungsi badan permusyawaratan desa di desa Bintang Ninggi

II Kecamatan Taweh Selatan Kabupaten Barito Utara, *Jurnal Administrasi Publik*
Volume 6 No 1 tahun 2020

Andrianto, *Implementasi kebijakan program kartu tangerang pintar pada jenjang pendidikan SMAN, SMK dan MAN di Kabupaten Tangerang*, Skripsi, Banten : 2017

Anggito.Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*.(Sukabumi : CV Jejak

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang per tanggal 10 Juli 2021 yang diakses melalui <http://dinkesjombangkab.go.id/> yang diakses pada 10 juli 2021 pukul 18.00 WIB

Data sebaran virus covid-19 pada 10 Juli 2021. <https://covid19.go.id/> yang diakses pada sabtu 10 Juli 2021 pukul 12.44 WIB

Data sebaran virus covid-19 pada 9 Juli 2021 <http://infocovid19.jatimprov.go.id/> yang diakses pada 10 Juli 2021 16.00 WIB

Dunn.William N..2003. *Pengantar analisis kebijakan public*.Yogyakarta : Gajah mada University press

Haedar Akib. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana.*Jurnal Administrasi Publik*.Volume 1 No. 1 Thn. 2010

Nurtje Iринi Djoys Guyen, Skripsi, *Implementasi kebijakan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) Dinas pendidikan dan pemuda olahraga Kabupaten Kepulauan Aru*, Jakarta : 2014

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006

Purwanto. Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyawati.2015.*Implementasi kebijakan publik : Konsep dan aplikasinya di Indonesia*.Yogyakarta : Gava media

Rini Sulistiyani, *Dampak kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat usaha garam rakyat (PNPM PUGAR) terhadap petani garam desa Kedungmuti kecamatan Wedung kabupaten Demak*, Skripsi, 2015

Subarsono.*Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. 2021.Yogyakarta : Pustaka pelajar

Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*.Bandung : Penerbit Alfabeta

Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang :Widya Karya

Suharno. 2016. *Dasar-dasar kebijakan publik : Kajian proses dan analisis kebijakan*. Yogyakarta : Penerbit Ombak

Syafiie.Inu Kencana. 2008.*Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*.Bandung : Refika Aditama

Undang-undang no 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan perundang-undangan